

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini menjadi semakin kompleks. Konteks saat ini di mana pemerintah beroperasi semakin rumit. Lingkungan ini terdiri dari dua komponen yaitu lingkungan fisik dan lingkungan nonfisik. Air, tanah, udara, dan lingkungan alam di sekitarnya membentuk kondisi geografis negara yang disebut sebagai lingkungan fisik. Norma-norma atau nilai-nilai yang benar-benar mendukung pemerintah, membentuk lingkungan nonfisik. Manusia dan lingkungan harus menjalin hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Ketidakseimbangan di antara keduanya dapat menimbulkan risiko dan masalah lingkungan yang berdampak pada kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, termasuk manusia (Nur & Husen, 2022). Lingkungan harus mendukung pariwisata berbasis masyarakat, di samping faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya, demi kehidupan yang sejahtera. Kelangsungan hidup manusia dan hewan lain terancam oleh berbagai masalah lingkungan, dan pengelolaan limbah, khususnya, telah menjadi masalah bagi semua wilayah dan bukan lagi masalah terpisah yang hanya ditangani oleh wilayah tertentu terutama masalah sampah. (Frinaldi *et al.*, 2022).

Seiring dengan isu-isu lingkungan lainnya, pengelolaan sampah semakin penting, terutama bagi kota-kota padat penduduk di negara-negara berkembang. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah sangatlah penting untuk mencegah dampak merugikannya (Cameron *et al.*, 2013).

Permasalahan ini bisa diselesaikan dengan dibuatnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada pengelolaan sampah, karena permasalahan ini bukan lagi hal yang biasa. Sampah sering kali mengakibatkan banjir pada jalan utama di Tanjungpinang, bahkan menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah menggunakan teknologi baru agar sampah tersebut dapat ditangani secara baik dan tidak lagi menyebabkan pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan (Setiawan, 2021).

Dampak yang akan terjadi pada sebuah kota apabila sampah tidak teratasi ialah seperti kesehatan masyarakat, konflik sosial, dan pencemaran lingkungan hingga pemanasan global (Mariane *et al.*, 2022). Kesehatan masyarakat sering terganggu oleh penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan. Contohnya, genangan air yang menyebabkan berkembangbiak jentik nyamuk sehingga menjadi pandemi penyakit DBD. Konflik sosial yang tidak terkendali juga bisa terjadi karena dampak sampah yang menumpuk di permukiman masyarakat. Pencemaran lingkungan juga tidak bisa dihindari karena sampah yang menumpuk sehingga mencemari ekosistem, terutama tanah. Contohnya, sampah plastik yang sangat lama proses penguraiannya hingga 450–1000 tahun.

Kebijakan pemerintah yang tidak sesuai akan menimbulkan dampak jangka panjang yang berisiko bagi masyarakat apabila kebijakan yang dibuat tidak sesuai untuk kepentingan masyarakat, dan contoh berbagai tempat yang telah menerapkannya. Salah satu daerah atau kota yang ada di Indonesia dan tidak luput

dari masalah persampahan adalah Kota Tanjungpinang yang menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Timbunan sampah di Kepri mencapai 157.340 ton pada tahun 2024, dengan angka 62,06% (97.637 ton) yang berhasil dikelola dengan baik, sementara 33% (51.939 ton) belum ditangani dan berisiko mencemari lingkungan. Permasalahan ini diperburuk oleh sampah plastik yang mencapai 20% dari total sampah yang menjadi ancaman serius bagi kelestarian laut di daerah pesisir kepulauan seperti Kepri. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah harus didukung oleh kepastian hukum serta kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah yang jelas. Untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah berjalan seimbang, efektif, dan efisien serta dapat mengubah sampah menjadi sumber daya yang menguntungkan secara ekonomi bagi wilayah tersebut, masyarakat dan sektor usaha harus dilibatkan dalam menangani masalah sampah. Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga mengatur mengenai pengawasan pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa saat penyelenggaraan pengelolaan sampah Pemerintah kabupaten dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memantau seberapa baik pihak-pihak terkait menangani sampah.

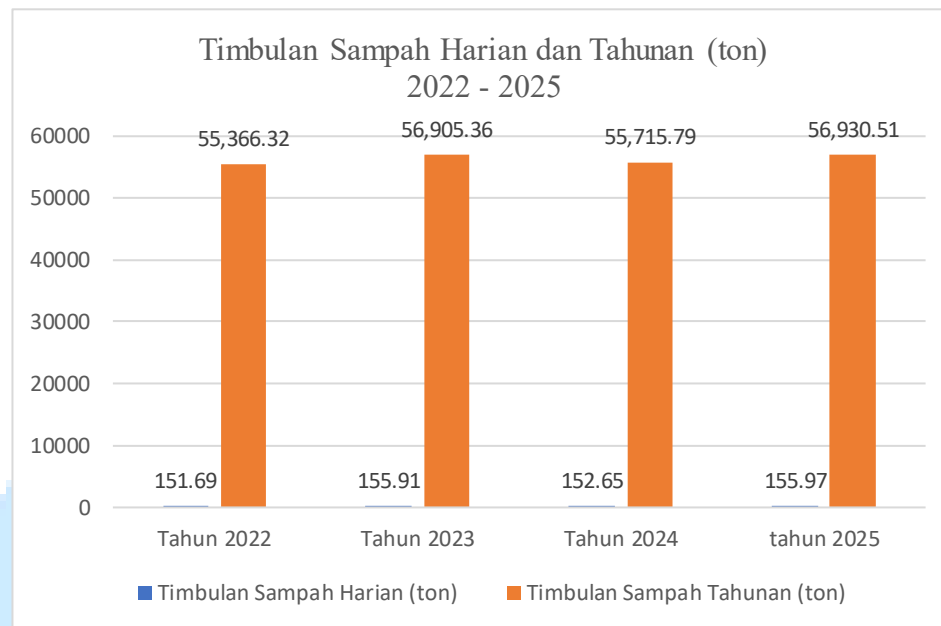
Masalah lingkungan merupakan perhatian utama bagi banyak orang di dunia modern. Tak dapat disangkal bahwa banyak aspek pembangunan di era modernisasi ini tidak seimbang dengan lingkungan, atau, dengan kata lain, gagal mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan sekitar, karena potensi kerusakan lingkungan terus muncul seiring dengan kemajuan di semua bidang pembangunan.

Karena itu, untuk mengurangi kemungkinan kerusakan lingkungan yang sangat besar dan untuk menerapkan prinsip manajemen yang baik yang berkaitan dengan komitmen untuk melindungi lingkungan, muncul konsep baru dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup yang disebut manajemen yang baik. Paradigma baru ini di bidang manajemen lingkungan hidup merupakan bagian penting dari pencapaian manajemen yang baik.

Selain itu, yang menjadi permasalahan dalam menjalankan konsep *Good Environmental Governance* (GEG) di Kota Tanjungpinang adalah kurangnya kepedulian masyarakat dalam manajemen pengelolaan sampah yang mengakibatkan banyaknya pencemaran lingkungan karena membuang sampah secara sembarangan oleh masyarakat. Dampak sampah di Tanjungpinang meliputi kerusakan lingkungan pesisir dan laut, gangguan kesehatan, dan kerugian ekonomi, terutama karena minimnya sarana pengelolaan sampah dan kesadaran yang rendah dari masyarakat. Tumpukan sampah di kawasan pesisir seperti Tanjung Unggat mengancam ekosistem laut, sementara sampah yang menumpuk di tempat pemrosesan akhir dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan.

Data sampah timbulan yang berada di Kota Tanjungpinang setiap harinya mengalami kenaikan. Melalui data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), terdapat data yang diperoleh berupa data timbulan harian dan timbulan tahunan. Berikut tabel data timbulan sampah di Kota Tanjungpinang.

Gambar 1. 1 Timbulan Sampah Harian dan Tahunan (ton) Tahun 2022 – 2025



Sumber: Rekapan data sampah tahun 2022-2025

Timbulan sampah juga menyebabkan munculnya pencemaran lingkungan di masyarakat, Sebagaimana terlihat di TPS Bintang Center, TPS Sei Jang, TPS SMP 16, dan TPS Engku Putri, produksi sampah juga telah menyebabkan pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar, terutama tumpahan sampah atau peningkatan volume sampah di tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang menjadi tempat pembuangan akhir dan tempat pemrosesan akhir (TPA) Ganet saat ini di TPA Ganet mengalami overload penampungan sampah. Melalui data yang pernah diteliti oleh Julia Rahmawati (2023). Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tanjungpinang, produksi sampah di Tanjungpinang mencapai 90 ton per hari. Penelitian ini berupaya memberikan solusi terhadap pelaksanaan yang terjadi di TPA Ganet dengan merasionalisasi pelaksanaan *Good Environmental Governance* serta mengorelasikan penelitian terdahulu. Maka, peneliti berharap

permasalahan ini bisa menjawab terkait permasalahan lingkungan yang terjadi, khususnya sampah yang menjadi permasalahan tiap tahun di Kota Tanjungpinang dengan menerapkan konsep *Good Environmental Governance*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masalah pengelolaan sampah TPA Ganet di Kota Tanjungpinang ditangani melalui tata kelola lingkungan yang baik.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengutip dari permasalahan dan latar belakang, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan *Good Environmental Governance* yang mana merupakan salah satu konsep untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana akan dibahas di bawah ini, manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori: manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi penelitian serupa di masa mendatang serta memberikan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan limbah di Tempat Pembuangan Akhir. (TPA) Ganet serta diharapkan untuk penelitian berikutnya lebih diperdalam kajian penelitiannya mengenai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ganet.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam penelitian, terdapat manfaat secara praktis yang berarti peran pemerintah sangat penting dalam pelaksanaan penelitian.

- a. Manfaat bagi Pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) TPA Ganet— mengenai pengawasan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di masa mendatang.
- b. Manfaat bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat setempat agar mereka dapat memahami masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan sampah serta untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan.
- c. Manfaat bagi para peneliti: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan dan memberikan wawasan baru mengenai sistem pengelolaan limbah yang efektif, serta berfungsi sebagai sumber daya baru untuk kegiatan pengajaran dan pembelajaran.